



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISMAIL NASUTION, SH, Sp.N
Jabatan : Kepala Bagian Pengembangan Ekonomi Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ERNITA BANGUN, SE, MAP
Jabatan : Kepala Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melalui supervisi yang diperlukan dan akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, Juni 2018

Pihak Pertama :

**Kepala Bagian Pengembangan Ekonomi
Daerah**

**ISMAIL NASUTION, SH, Sp.N
PEMBINA
NIP. 19640319 198502 1 001**

Pihak Kedua :

**Kepala Biro Bina Perekonomian
Setdaprovsu**

**ERNITA BANGUN, SE, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610327 198103 2 002**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BAGIAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam pengendalian kebijakan nasional di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), alokasi pupuk bersubsidi, pengendalian inflasi daerah (TPID), penyaluran raskin dan pengawasan garam.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teraksesnya layanan jasa keuangan formal kepada masyarakat dan UMKM dalam rangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. 2. Terlaksananya penyaluran Bantuan Sosial Pangan Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Sumut. 3. Termonitor dan terevaluasinya pelaksanaan sertifikasi tanah UKM. 4. Termotivasinya Kab/Kota untuk menyalurkan Raskin/Rastra tepat waktu, tepat pembayaran, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat administrasi dan tepat sasaran. 5. Meningkatnya efektifitas pelaksanaan KUR, meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penyerapan tenaga kerja. 6. Terlaksananya Tata Kelola BUMD 7. Diperolehnya informasi mengenai kinerja BUMN/BUMD 8. Terlaksananya Sosialisasi KPBU dalam pembiayaan infrastruktur di Sumut 9. Terlaksana Strategi BUMD dalam Peningkatan PAD/Deviden 10. Terjaganya ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan barang dan jasa 11. Diperolehnya data-data kondisi pasar tradisional dalam mewujudkan pasar tradisional yang bersih, aman dan nyaman 12. Termonitorinya perkembangan harga sembako dan bahan penting lainnya 13. Termotivasinya TPID kab/kota dalam mengegah inflasi tinggi 	<p>25 Kabupaten/ Kota</p> <p>32 Kabupaten/ Kota</p> <p>15 Kabupaten/ Kota</p> <p>33 Kabupaten/ Kota</p> <p>15 Kabupaten/ Kota</p> <p>7 BUMD</p> <p>2 BUMN/BUMD</p> <p>50 Orang</p> <p>70 Orang</p> <p>25 Kabupaten/ Kota</p> <p>15 Kabupaten/ Kota</p> <p>15 Kabupaten/ Kota</p> <p>20 Kabupaten/ Kota</p>

Kegiatan

Anggaran

1. Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Rp. 74.129.856
2. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Raskin/Rastra di Sumut.	Rp. 119.964.730
3. Monitoring dan Evaluasi kelompok kerja lintas sektor untuk kegiatan sertifikasi hak atas tanah program pemberdayaan usaha mikro dan kecil	Rp. 100.349.984
4. Penilaian dan Penganugerahan Raskin Award Tahun 2017 dari Gubernur kepada Bupati / Walikota	Rp. 124.576.789
5. Monitoring dan Evaluasi KUR di Sumatera Utara	Rp. 77.559.320
6. Koordinasi dan Monitoring perkembangan/kegiatan usaha BUMD Pemprov	Rp. 149.617.993
7. Keikutsertaan Pemprov dalam menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMN/BUMD	Rp. 79.960.080

8.	Sosialisasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembiayaan infrastruktur di Sumatera Utara	Rp	65.620.590
9.	Strategi BUMD Provsu dalam Pengelolaan dan Peningkatan PAD/Deviden	Rp	74.641.650
10.	Monitoring dan Evaluasi TPID	Rp	234.822.893
11.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2012	Rp	99.777.075
12.	Monitoring dan Evaluasi 9 (Sembilan) Bahan pokok dan bahan penting lainnya	Rp	89.682.680
13.	Penilaian, Pemberian Penghargaan TPID Award kepada TPID Kab/kota	Rp	75.507.890

Medan, Juni 2018

**Kepala Biro Bina Perekonomian
Setsaprovsu**



**ERNITA BANGUN, SE, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610327 198103 2 002**

**Kepala Bagian Pengembangan
Ekonomi Daerah**



**ISMAIL NASUTION, SH, Sp.N
PEMBINA
NIP. 19640319 198502 1 001**